

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kota Bandung sekarang ini mengalami sebuah Perkembangan teknologi dimana dari tahun ke tahun atau dari masa ke masa perubahan itu semakin nyata. Perkembangan itu harus terlihat perannya dalam membantu organisasi pemerintah untuk menjadi lebih efisien , serta sebagai alat memenangkan kompetisi maupun membuat sebuah inovasi dalam menangani sebuah masalah.

“Menurut Hetifa Sj.Sumarto bahwa dalam kurun waktu lima tahun belakangan ini, organisasi-organisasi *civil society*, dengan atau tanpa dukungan berbagai lembaga internasional, terus aktif “Melahirkan “ sejumlah inisiatif-inisiatif baru, Sebagian berkembang menjadi bagian penting dari proses perubahan yang masih terus berlangsung di Indonesia.”(Sumarto,Hetifa Sj.2003)

Perubahan tersebut perlu dilakukan dikarenakan Perubahan-perubahan akan nampak setelah tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang lama dapat dibandingkan dengan tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang baru, Sehingga perlu aktif secara keseluruhan menciptakan Inovasi-inovasi dalam memecahkan masalah.

Tahun 2003 merupakan langkah awal di Indonesia untuk bisa menerapkan kebijakan *Electronic Government (E-Government)*. Melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Kebijakan ini sifatnya praktis, dimana didalam isinya telah memuat

langkah-langkah yang diperlukan Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam melaksanakan pengembangan *E-Government* secara nasional yang berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional. dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu *E-Government* bertujuan untuk mendukung menuju pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tersebut benar-benar memiliki manfaat dan dampak jangka panjang bagi masyarakat luas, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan itu sendiri memerlukan suatu upaya keberlanjutan dan kesinambungan. Kemudian perubahan demi perubahan mulai tercipta.

Gagasan pengelolaan sampah terpadu diterapkan untuk mengurangi limbah pada sumbernya. Ini berarti bahwa limbah yang dihasilkan harus dipulihkan untuk digunakan kembali dan daur ulang, sehingga hanya residu yang dibuang di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Output dari pengolahan yang digunakan sebagai bahan masukan dalam proses atau dikonversi menjadi nilai tambah masukan bagi proses lainnya, memaksimalkan konsumsi sumber daya dan meningkatkan efisiensi (Ngoc dan Schnitzer, 2009).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga Bagian Ketiga Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pasal 4 menyebutkan :

1. Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
2. Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;

- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pembentukan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna melalui Program maupun aplikasi harus dapat menangani persoalan sampah yang sedang terjadi di masing-masing Provinsi Kota maupun Kabupaten di Indonesia. Diharapkan Program berkolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pihak swasta dan organisasi yang bergerak dalam bidang lingkungan untuk pengelolaan sampah pada dasarnya menggunakan prinsip *zero waste* didasarkan pada penggunaan kembali (*recycle*).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 1 ayat 3 dan ayat 7 menjelaskan bahwa:

“Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.”

“Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.”

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Bab V Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Pasal 33 menjelaskan bahwa:

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan sampah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melakukan:
 - a. penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah; dan
 - b. fasilitasi pemerintah daerah dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan sampah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melakukan fasilitasi:
 - a. kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah; dan
 - b. pemerintah daerah dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. badan usaha; dan/atau
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.

Pemanfaatan teknologi dalam menanggulangi sampah diharapkan dapat membantu terhadap proses kebersihan kesehatan dan keindahan tata kota, Masalah sampah merupakan masalah yang kompleks. Kompleksitas itu misalnya dari sisi manajemen berarti perlu dilakukan perencanaan Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Persoalan sampah di Kota Bandung seakan tidak pernah berhenti. Upaya pemerintah di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten untuk mengatasi sampah terus berlanjut. Jumlah Sampah yang ada di kota Bandung mengalami naik turun jumlah

Rata-Rata Produksi Sampah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 data tersebut bisa dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rata-Rata Produksi Sampah Kota Bandung 2017-2021

Tahun	Produksi Sampah (Ton/Hari)
2017	2448.63
2018	2441.12
2019	1575.73
2020	1630
2021	1529.04

(Sumber : opendata.jabarprov.go.id) (Diakses Tanggal 28 April 2022)

Berdasarkan data Tabel 1.1, diketahui bahwa rata-rata produksi sampah Kota Bandung pada tahun 2017 mengalami penumpukan sebanyak 2448.63 ton/hari. Pada tahun 2018 rata-rata produksi sampah Kota Bandung menurun menjadi 2441.12 ton/hari dan pada tahun 2019 rata-rata produksi sampah Kota Bandung mengalami penurunan menjadi 1575.73 ton/hari. Kemudian pada tahun 2020 rata-rata produksi sampah Kota Bandung kembali meningkat menjadi 1630 ton/hari dan pada tahun 2021 rata rata produksi sampah mengalami penurunan menjadi 1529.04 ton/hari.

Jumlah produksi sampah Kota Bandung 2017 sampai 2021 membuat terjadinya permasalahan di antaranya membuat kota bandung yang dulu pernah mendapatkan

julukan Kota Kembang berubah menjadi “kota terkotor”. Permasalahan Sampah juga membuat Masyarakat Kota Bandung mengalami bencana banjir dan mengalami penyakit diare, disentri, cacangan, dan demam berdarah.

Beragam program untuk membersihkan nama Bandung dari sebutan “kota sampah” terus dilakukan. Persoalan sampah di Kota Kembang selalu menjadi sorotan berbagai pihak. Setelah longsohnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah, limbah domestik rumah tangga ini menjadi bahan diskusi menarik. Memang, selain menimbulkan korban jiwa, kerugian material, juga berdampak buruk pada lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat Bab V Tugas Dan Wewenang Bagian Kesatu Provinsi Paragraf 1 Tugas Pasal 5 Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah regional yang baik dan berwawasan lingkungan di Daerah, Paragraf 2 Wewenang Pasal 6 Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang, Pasal 7 Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah skala Kabupaten atau Kota yang baik dan berwawasan lingkungan, Pasal 8 Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai wewenang.

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa dalam pengelolaan sampah di Daerah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab, kewenangan Pemerintah Daerah dan peran masyarakat serta dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah

dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Perkembangan ini menjadi bagian penting dari proses perubahan yang masih terus berlangsung di Indonesia khususnya Kota Bandung dalam penanganan persoalan Sampah.

Pemerintah Daerah Kota Bandung membuat kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Bandung No 9 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, sebagai petunjuk teknis dan pedoman dalam upaya pengurangan penggunaan kantong plastik secara terukur di Kota Bandung. Melalui Peraturan tersebut dibuatkanlah sebuah kebijakan yang dinamakan gerakan “Kang Pisman”.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 Tentang pengelolaan sampah memiliki konsekuensi terjadinya perpindahan kewenangan penyapuan jalan pengangkutan sampah dan pengolahan sampah warga ke TPA dari PD Kebersihan yang dibubarkan dan melebur ke UPT DLH Kota Bandung dan pendelegasian sebagian kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah kepada Kecamatan yang ada di wilayah Kota Bandung. Salah satunya Kecamatan Mandalajati dalam penyelenggaraan pengelolaan sampahnya membuat bank sampah yang menggunakan inovasi teknologi aplikasi. Kebijakan yang diterapkan untuk mendukung Inovasi tersebut yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 aturan ini tergambarkan melalui Buku Inovasi Bandung *Smart City*. Kecamatan Mandalajati adalah kecamatan percontohan dalam program 100 hari kerja walikota bandung dalam rangka Beberes Bandung yang fokus mengatasi sampah.

Kebijakan gerakan “Kang Pisman” yang merupakan program unggulan Kota Bandung dalam Penerapan Kawasan Bebas Sampah (KBS) Kecamatan Atau Kelurahan lain memiliki program hal yang sama memiliki bank sampah dan sudah banyak dilaksanakan di masing-masing kewilayahan Sebanyak delapan kelurahan di Kota Bandung menjadi *role model* atau percontohan bagi kelurahan lainnya dalam penerapan Kawasan Bebas Sampah (KBS). Kedelapan kelurahan tersebut antara lain Sukamiskin, Sukaluyu, Gempolsari, Cihaurgeulis, Kujangsari, Neglasari, Babakansari, dan Kebon Pisang bentuknya berkolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat dengan pengelolaan dan pengolahan sampah secara dimanfaatkan sesuai jenisnya dan Kawasan *Waste to Food* Sampah dapur diolah menjadi pupuk, kompos basah dan kering untuk menyuburkan Tanaman. Sementara Pemerintah Kecamatan Mandalajati diawal menggagas Pelaksanaan Kang Pisman berbasis teknologi dan ekonomi dari menjual sampah dan hasilnya untuk membayar PBB.

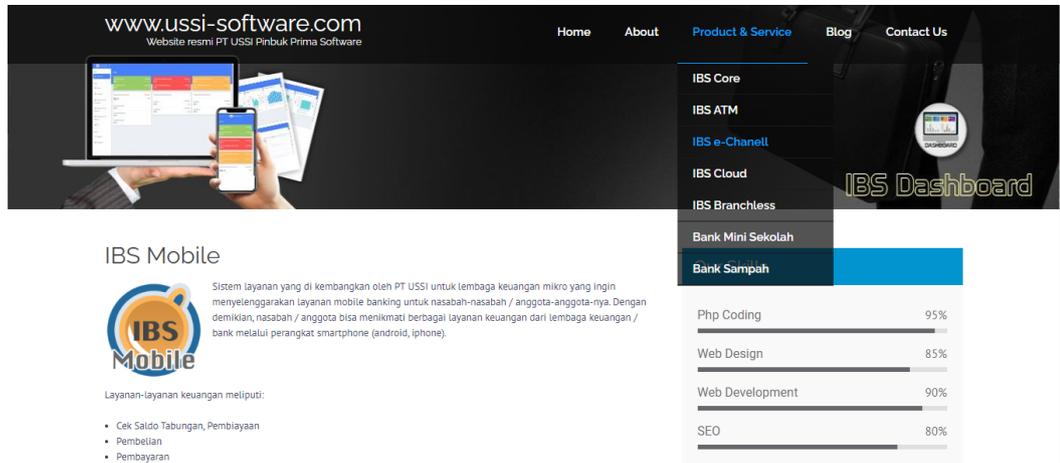
Pemerintah Kecamatan Mandalajati mengeluarkan kebijakan terkait dengan aplikasi lewat Keputusan Camat Mandalajati Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bank Sampah Mandiri Kecamatan Mandalajati Tahun 2020. Melakukan input data kegiatan Bank Sampah Mandiri meliputi pula Bank Sampah Unit (Kelurahan) ke dalam Sistem Aplikasi IBS (*Intergrate Bank System*) yang merupakan Aplikasi Kang Pisman Mobile. Aplikasi Kang Pisman Mobile merupakan sebuah sistem yang dibentuk untuk menyajikan informasi data sampah tabungan, dan fitur belanja dan pembayaran PBB, Listrik, Telepon dan Lain-lain.

Aplikasi Kang Pisman Mobile diluncurkan pada tanggal 14 Mei 2020. Pusat informasi ini tersedia dalam bentuk aplikasi yang dapat diunduh lewat *Play Store*

oleh masyarakat luas, dengan tujuan memudahkan untuk mengelola dan mengurangi sampah yang ada di wilayah Kota Bandung dan wilayah kecamatan mandalajati.

Aplikasi Kang Pisman Mobile dikembangkan pemerintah kecamatan Mandalajati, Bank Sampah Indonesia dan *USSI Group*, *USSI Group* atau lebih dikenal dengan USSI (tanpa singkatan) merupakan perusahaan teknologi informasi yang bergerak dalam pengembangan software untuk lembaga keuangan mikro di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan mikro dan produk layanan teknologi di Indonesia *USSI Group* Bekerja sama dengan Bank Sampah Indonesia dan Pemerintah Kecamatan Mandalajati dalam memudahkan pengelolaan dalam mengurangi sampah yang ada di wilayah Kota Bandung dan sebagai aplikasi tabungan keuangan pembayaran dan pembelian sampah yang dijual menjadi semakin mudah. Masyarakat hanya cukup mengaksesnya melalui telepon genggam yang dapat diunduh di *Google Play Store*. Program ini juga tersedia dalam bentuk website Monitoring, *Mini Core*, *Smart Card*, Aplikasi Bank Sampah Indonesia, dengan adanya aplikasi Kang Pisman Mobile memudahkan masyarakat dalam mengelola dan mengurangi sampah yang ada di wilayah rumah maupun tempat bekerja. Berikut gambar ussi group yang terdapat pada gambar 1.1 berikut ini

Gambar 1.1
Gambaran USSI Group



(Sumber Gambar: Olahan Data Peneliti,2022)

Pemerintah Kecamatan Mandalajati bekerja sama dengan USSI group dalam bidang Informasi teknologi dalam pembuatan aplikasi bank sampah Indonesia. aplikasi kang pisman mobile yang selama ini telah digunakan oleh masyarakat mandalajati telah mendapatkan sebuah manfaat dalam pengelolaan sampah yang bisa digunakan untuk melakukan berbagai macam pembayaran

Aplikasi Kang Pisman Mobile memiliki tampilan warna yang cukup menarik yaitu biru muda dan terdapat seorang tokoh memakai baju adat sunda dan iket kepala dan tangannya membentuk angka Jari jempol dan telunjuk yang menyatu sementara tiga jari lainnya tetap tegak mengajak melakukan penerapan prinsip 3 R (*reduce, reuse, recycle*) merupakan langkah nyata pengendalian dan pencemaran lingkungan. Dengan melakukan 3 R mengurangi beban pencemar (*pollutant load*) yang dibuang ke lingkungan, baik pencemar air, tanah maupun udara. Yang membuat masyarakat ataupun pengguna aplikasi ini sangat nyaman dalam mengaksesnya. Desain yang trendi dengan animasi yang ilustratif, membuat

aplikasi ini lebih mudah untuk dipahami cara penggunaannya. Aplikasi ini dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini.

Gambar 1.2

Aplikasi Kang Pisman Mobile Mandalajati



(Sumber: Aplikasi KANG PISMAN tahun 2022)

Berdasarkan Gambar 1.1 Kang Pisman Mobile merupakan salah satu media layanan dari *product Integrated micro Banking System (IBS e-Channel)* untuk nasabah lembaga keuangan mikro agar dapat melakukan transaksi keuangan elektronik menggunakan *smarthphone*.

Aplikasi dapat diunduh di *Play Store*, Setelah Mengunduh Aplikasi Kang Pisman Mobile dan nasabah membawa hasil memilah sampah dari rumahnya masing-masing, kemudian di setorkan ke kecamatan, nanti berat sampah yang ditimbang akan dihitung, kemudian nasabah mendaftarkan akunya dengan mengisi kode LKM yang akan diberikan petugas Bank Sampah Indonesia yang ada di kecamatan

mandalajati, kemudian pengisian data lewat aplikasi khusus petugas untuk mengisi data pribadi nasabah seperti nama, nomor telepon yang akan digunakan di aplikasi, alamat rumah dan pekerjaan, setelah itu akan ada kode masuk kemudian kode tersebut akan dikirimkan ke salah satu nomor untuk di registrasi, Setelah itu muncul *device id* yang akan tertera di aplikasi, kemudian memasukkan kode LKM dan Pin Yang diberikan petugas kemudian kirim, Selanjutnya membuat *password* setelah itu kembali ke halaman utama untuk *login* dengan memasukkan *password*. Aplikasi Kang Pisman Mobile Tersedia Fasilitas transaksi :

- Cek Saldo Tabungan/Simpanan
- Informasi Mutasi Rekening Tabungan
- Informasi Riwayat Kredit/Pinjaman
- Pembayaran
 1. Jastel
 2. PLN Postpaid
- Pembelian
 1. Pembelian Pulsa
 2. Pembelian token listrik

Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Setiap wilayah yang ada di kota bandung khususnya Kecamatan Mandalajati kota bandung provinsi jawa barat melaksanakan peraturan tersebut melalui memberikan pelayanan yang merata terhadap masyarakat Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dengan aplikasi bank sampah yang dapat menyimpan saldo keuangan dan bisa

melakukan transaksi pembayaran dan pembelian, Berbagai inovasi pelayanan dengan memanfaatkan sampah yang masih berguna dapat mewujudkan pertumbuhan perekonomian Daerah Kota yang mampu memenuhi tantangan.

E-government (e-gov) dalam proses pemanfaatan teknologi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien khususnya dalam pengelolaan Sampah. Karena itu, ada dua hal utama dalam pengertian *E-Government* di atas; yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu, dan yang kedua adalah tujuan pemanfaatannya, sehingga pemerintah dapat berjalan lebih efisien. Kendati demikian *E-Government* bukan berarti pengganti pemerintah dalam berhubungan dengan masyarakat.

Implementasi Kebijakan *E-Government* di Kelurahan Mandalajati sebagai teknologi penelitian dan pengembangan pengurangan, penanganan sampah dan memiliki manfaat di era informasi yang berkembang. Hal itu tidak berjalan efektif dikarenakan observasi awal yang peneliti lakukan terhadap aplikasi Kang Pisman Mobile, ditemukan beberapa permasalahan penelitian diantaranya:

1. kurang efektif dan efisiennya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dan kecamatan mandalajati terhadap hadirnya aplikasi Kang Pisman Mobile, karena sosialisasi dilakukan tidak intensif dan tidak berkelanjutan. Karena hal tersebut masyarakat Kecamatan Mandalajati kurang mendapatkan informasi tentang keberadaan aplikasi Kang Pisman Mobile, Terlihat dari data unduhan yang tertera pada *Google Play Store* jumlah pengguna yang

mengunduh aplikasi Kang Pisman Mobile hanya ada sekitar 100 akun dan jumlah nasabah 444 orang , sementara itu pada data sensus penduduk tahun 2022 masyarakat Kecamatan Mandalajati tercatat ada sekitar 66,699 penduduk. Sehingga tujuan dari memberikan informasi yang masif, masih belum tepat sasaran.

2. Faktor anggaran yang kurang membuat Kebijakan *E-Government* berjalan tidak sesuai yang diharapkan.
3. Masih kurang dan lambat dalam pemeliharaan sistem yang dilakukan oleh user aplikasi terkait yang mengelola aplikasi Kang Pisman Mobile untuk terus memperbaharui dan menyelesaikan masalah yang dihasilkan dari aplikasi tersebut.
4. Pendaftaran Aplikasi Kang Pisman Mobile tidak efektif dikarenakan masih dilakukan melalui Aplikasi Khusus Petugas Bank Sampah, Hal itu membuat masyarakat harus datang ke Kecamatan maupun Petugas datang langsung ke rumah masyarakat.

Adanya aplikasi tersebut masih belum optimal mengubah cara hidup manusia dari pola tradisional berubah menjadi elektronik, hal ini tidak dapat dihindari oleh setiap manusia dikarenakan butuh proses. Pengaruh globalisasi sekarang ini sudah masuk ke seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat mulai dari kebutuhan pokok, pendidikan, pengetahuan, politik dan pemerintahan dalam meningkatkan kinerja pemerintah pusat maupun daerah. Sasaran dari inovasi daerah tersebut harus diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan pada masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Teknologi mempermudah dalam transaksi jual beli produk-produk baru, sedikit yang melakukan transaksi terhadap barang bekas atau barang yang tidak bisa digunakan lagi (tidak bernilai/ tidak ada nilai jual). Penggunaan kembali, minimalisir dan daur ulang sangat dibutuhkan untuk mengurangi beban timbulan sampah yang akan ditanggung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan lingkungan. Persoalan sampah awalnya dilakukan oleh Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung namun berdasarkan peraturan daerah Kota Bandung nomor 9 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung.

Penanggulangan sampah dengan menggerakkan program “Kota Bandung bebas plastik” atau “*Zero Waste*” serta upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengolah sampah menjadi barang yang bernilai yaitu dengan program pelatihan-pelatihan mendaur ulang sampah agar bernilai seni, tetapi tidak semua masyarakat dapat mengolah sampah dengan baik, terutama masyarakat yang berdiam di pinggir sungai dan jauh dari tempat pembuangan sampah, cenderung mereka membuang sampah ke sungai atau membakar sampah yang berdampak kepada kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan.

Apabila jumlah penduduk yang terus meningkat dan keseimbangan lingkungan yang tidak sesuai maka hal yang di khawatirkan adalah rusaknya lingkungan tersebut dan akan berpengaruh pada pola hidup masyarakat menjadi konsumtif. Lewat Kebijakan untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun *electronic government for e good governance* yang terintegrasi mulai dari tingkat pemerintahan daerah hingga ke pusat tujuannya adalah infrastruktur *Information*

and communication technologies (ICT) yang akan dibangun dapat dimanfaatkan secara bersama untuk berkoordinasi oleh seluruh instansi, baik pusat maupun daerah.

Sebelum penelitian ini dilakukan peneliti merujuk ke beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki tema tentang kebijakan penggunaan aplikasi pemerintahan, yang menjadi bahan referensi bagi peneliti saat ini. Pertama, Dewi Kurniasih, Tatik Fidowaty, dan Poni Sukaesih (2013) tentang pengaruh implementasi kebijakan *E-Government* terhadap kinerja aparatur kota cimahi pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa penerapan *E-Government* signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah di Kota Cimahi. Implementasi kebijakan *E-Government* memberikan pengaruh sebesar 54,85% terhadap perubahan kinerja aparatur pemerintah di Kota Cimahi. Meskipun tidak terlalu besar, namun implementasi kebijakan *E-Government* merupakan salah satu faktor yang dominan dalam menentukan perubahan kinerja aparatur pemerintah di Kota Cimahi.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh, Diah Rachma Aprianty (2016) Penerapan Kebijakan *E-Government* Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa Di dalam proses pelaksanaan kebijakan *E-Government* di Kecamatan Sambutan terdapat kendala-kendala yang dihadapi yaitu, terbatasnya sumber daya yang dimiliki, kurangnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, miskomunikasi antara pimpinan dan pegawai.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh, Sansprayada, A., & Mariskhana, K. (2020). Implementasi Aplikasi Bank Sampah Berbasis Android Studi Kasus Perumahan Vila Dago Tangerang Selatan. pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa Di dalam proses Aplikasi tersebut dibuat dengan anatarmuka yang familiar sehingga pengguna lebih mudah menggunakannya. Aplikasi itu dapat memberikan kemudahan kepada petugas Bank Sampah Perumahan Vila Dago Tangerang Selatan dalam melakukan setiap layanan menggunakan aplikasi android. Aplikasi tersebut memberikan kemudahan untuk para nasabah dalam melakukan transaksi dimana saja dengan menggunakan aplikasi android di smartphone mereka. Aplikasi ini memberikan kemudahan untuk para nasabah dalam melakukan pengecekan saldo tabungan mereka menggunakan aplikasi android di smartphone mereka. Aplikasi tersebut memberikan kemudahan untuk para pengepul dalam melakukan pengecekan stok sampah yang tersedia di Bank Sampah Perumahan Vila Dago Tangerang Selatan dan melakukan transaksi pengambilan sampah di Bank Sampah Perumahan Vila Dago Tangerang Selatan. Namun Aplikasi tersebut masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dalam kata sempurna. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi agar lebih baik.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh, Wiwiet Hertiarani (2016) Implementasi Kebijakan E-Samsat Di Jawa Barat, pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa Banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya kebijakan E-Samsat, tidak memahami alur proses dan tata cara pembayaran menggunakan E-Samsat, karena kurang mendapatkan informasi secara menyeluruh dan tuntas, format dan media sosialisasi yang telah dibuat terputus dan kurang tersebar, Tidak

semua masyarakat pemilik ranmor berpelat Jawa Barat dan calon pengguna kebijakan ini, memiliki rekening di Bank BJB, Adanya proses pencocokan NIK pemilik ranmor dengan NIK data nasabah pada server Bank BJB. Data NIK harus persis sama. Serta alur proses kebijakan ini masih ditemukan kendala dengan server dan kendala akses jaringan untuk kode bayar yang memaksa pengguna layanan untuk melakukan sejumlah aktifitas dan melakukan antrian, Perlu ditindak-lanjutnya suatu aturan agar sosialisasi dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, berkelanjutan dan dapat dinikmati dan diakses dengan mudah oleh calon pengguna layanan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh, Rino Adibowo, Sylvia Octa Putri (2016) Penerapan *E-Government* Dalam Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung, pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa aplikasi tersebut belum memiliki page khusus dalam portal, Belum tersedianya pilihan multi bahasa, belum terlihat hasil dan manfaat dari kerjasama *sister city* antara Pemerintah Kota Bandung dengan kota lainnya yang dapat diakses oleh publik didalam portal bandung.go.id.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Indra Gunawan Wibiksana (2020) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kurangi, Pisahkan Dan Manfaatkan (Kang Pisman) Di Kota Bandung, pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa Penguatan Kapasitas Individu, Penguatan kapasitas kelembagaan, Penguatan kapasita jejaring belum terlaksana secara menyeluruh dan belum optimal di program Kang Pisman.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang sudah dikemukakan di atas, bahwa sumber daya yang dibutuhkan harus berkualitas yang sudah dilatih melalui pelatihan bertahap, serta pengelolaan teknologi informasi khususnya bidang aplikasi, semua itu sangat beriringan dengan konsep *E-Government*. Maka, pengelolaan suatu aplikasi dapat dilakukan sebaik mungkin. Dengan melakukan kebijakan terkait penggunaan aplikasi berbasis *E-Government*, menjadi hal utama guna tercapainya pemberian informasi yang masif dan efektif dan Program Kang Pisman yang belum Optimal. Dalam pemaparan hasil penelitian diatas diketahui terdapat perbedaan dan persamaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan, dalam hal persamaan dalam penelitian ini terdapat pada hal implementasi Kebijakan *E-Government* dan Program Kang Pisman, dimana bisa diketahui Implementasi kebijakan *E-Government* beberapa masih ada yang baru dan ada beberapa yang masih berjalan sudah lama di daerah tersebut yang berfokus pada aplikasi yang digunakan sebagai pelayanan publik terhadap masyarakat dan Program Kang Pisman program bergerak dalam bidang lingkungan untuk pengelolaan sampah. Sedangkan dalam hal perbedaan terdapat pada obyek penelitian, pada penelitian sebelumnya berfokus pada penerapan *E-Government* dan Pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan *E-Government* Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile Di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka untuk mempermudah proses pembahasan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam Pengelolaan Sampah melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile dilihat dari beberapa indikator sebagai sebagai berikut

1. Bagaimana Ukuran dan Tujuan yang dijadikan sebagai ukuran utama untuk melaksanakan Implementasi kebijakan *E-Government* dalam Pengelolaan sampah melalui aplikasi Kang Pisman Mobile?
2. Bagaimana Sumber daya dapat memberikan manfaat pada pelaksanaan agar dapat berjalan sesuai rencana Implementasi kebijakan *E-Government* dalam Pengelolaan sampah melalui aplikasi Kang Pisman Mobile?
3. Bagaimana Komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan Implementasi kebijakan *E-Government* dalam Pengelolaan sampah melalui aplikasi Kang Pisman Mobile?
4. Bagaimana Karakteristik organisasi pelaksana dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan *E-Government* dalam Pengelolaan sampah melalui aplikasi Kang Pisman Mobile?
5. Bagaimana Sikap para pelaksana dari aparaturnya dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan *E-Government* dalam Pengelolaan sampah melalui aplikasi Kang Pisman Mobile?

6. Bagaimana lingkungan sosial, ekonomi dan politik aparatur dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan *E-Government* dalam Pengelolaan sampah melalui aplikasi Kang Pisman Mobile?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam Pengelolaan Sampah melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Sedangkan tujuan yang dicapai dalam penulisan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Ukuran dan Tujuan. Ukuran tujuan adalah suatu dasar yang dijadikan sebagai ukuran utama untuk melaksanakan setiap kebijakan Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam Pengelolaan sampah melalui aplikasi Kurangi, Pisahkan Dan Manfaatkan (Kang Pisman) Mobile sampah di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang akan diterapkan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Sumber daya adalah suatu komponen yang dapat memberikan manfaat pada pelaksanaan agar dapat berjalan sesuai rencana, jadi dalam menjalankan suatu Program (kebijakan) peran sumber daya sangat diperlukan. untuk membantu terwujudnya tujuan penggunaan aplikasi Kang Pisman Mobile dalam Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam Pengelolaan sampah melalui aplikasi Kurangi, Pisahkan Dan

Manfaatkan (Kang Pisman) sampah Mobile di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

3. Untuk mengetahui dan menganalisis Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan merupakan cara yang dilakukan para aparatur pelaksana untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari dibentuknya sebuah Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam Pengelolaan sampah melalui aplikasi Kurangi, Pisahkan Dan Manfaatkan (Kang Pisman) sampah Mobile di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Karakteristik organisasi pelaksana adalah sikap dari masing-masing pelaksana kebijakan. Sikap ini dapat dijadikan patokan dari pelaksana kebijakan dalam Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam Pengelolaan sampah melalui aplikasi Kurangi, Pisahkan Dan Manfaatkan (Kang Pisman) sampah Mobile di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis Sikap para pelaksana, Sikap pelaksana adalah sikap yang dominan dari aparatur kebijakan dalam Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam Pengelolaan sampah melalui aplikasi Kurangi, Pisahkan Dan Manfaatkan (Kang Pisman) sampah Mobile di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik adalah kondisi pemerintahan yang sangat berpengaruh penting pada berjalannya kebijakan dalam Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam Pengelolaan sampah melalui aplikasi

Kurangi, Pisahkan Dan Manfaatkan (Kang Pisman) sampah Mobile di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut beberapa kegunaan pada penelitian ini :

1. Guna Teoritis

- a. Guna Teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Implementasi kebijakan *E-Government* dalam pengelolaan sampah melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari peneliti di program studi Ilmu Pemerintahan.

2. Guna Praktis

Guna praktis diarahkan untuk dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan mengenai Implementasi kebijakan *E-Government* dalam pengelolaan sampah melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan

Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat secara praktis , diantaranya:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan wawasan yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan peneliti tentang kebijakan *E-Government*. Di samping itu, peneliti ingin mengetahui/membandingkan tingkat kesesuaian teori dengan praktik yang terjadi di lapangan.

b. Bagi Pemerintah Kota Bandung dan Kecamatan Mandalajati

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bandung dan Kecamatan Mandalajati, dalam meningkatkan pengelolaan aplikasi Kang Pisman Mobile menjadi lebih baik lagi.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi perpustakaan dan bahan pembanding bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengembangan penelitian berikutnya di bidang yang sama di masa mendatang.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat Kota Bandung dan Kecamatan Mandalajati mendapatkan informasi Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam Pengelolaan sampah.